

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2013 – 2015

Susilowati <sup>1)</sup>

Suharno <sup>2)</sup>

Djoko Kristianto <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: <sup>1)</sup> susilowati1994@yahoo.co.id

<sup>2)</sup> suharno\_mm\_akt@yahoo.com

<sup>3)</sup> djokokristianto@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the financial performance optimization in Karanganyar regency government by using financial ratio indicators of the budget for Fiscal Year 2013-2015. The research method using the case study method in Karanganyar district administration, the type of data used quantitative and qualitative data, the data source used secondary data. Data collection methods used documentation. The method used descriptive quantitative method to measure financial performance with financial ratios. In conclusion that: 1) The results of the analysis of the ratio of the degree of fiscal decentralization Karanganyar years 2013 to 2015 show in 2013. The ratio of Degree of Fiscal Decentralization on Local Government Karanganyar of 9,81%. In 2014 decreased to 9,76%, the next year increased to 11,21% occurred in the category less. 2) The results of the analysis of the dependency ratio Karanganyar years 2013-2015 show financial dependence is relatively low. 3) The results of the analysis of the ratio of local financial independence in 2013 to 2015 showed Karanganyar Karanganyar financial capability is still relatively very low and relationship patterns including patterns instructive relationship where the role of central government is more dominant than the independence of local government (areas that are not capable of implementing regional autonomy), 4) The results of the analysis of effectiveness ratio of PAD Karanganyar years 2013 to 2015 show that the effectiveness of the Local Government Finance Karanganyar in 2013 and 2014 is quite effective, and 2015 was very effective. 5) The results of the analysis of regional spending efficiency ratio Efficiency Ratio Regional Shopping Karanganyar years 2013-2015 as very efficient for intervals of less than 10% efficiency.*

**Keywords:** *financial ratios, financial performance of local government*

## PENDAHULUAN

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien dan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta

meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan adanya analisis rasio keuangan terhadap APBD, maka semua pihak yang berkepentingan memiliki alat ukur untuk melihat beberapa aspek keuangan dalam APBD, beberapa aspek yang paling mendasar adalah menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah serta mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerah. Tolok ukur kinerja, adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah. Untuk menilai kinerja digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut: 1) Unsur masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 2) Unsur proses adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. 3) Unsur keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. 4) Unsur hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. 5) Unsur manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 6) Unsur dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu, sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber keuangan yang potensial, melainkan disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selain itu sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan potensi-potensi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, untuk itu pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya meningkatkan pendapatan daerah, dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya, khususnya dalam bidang pariwisata serta pendapatan-pendapatan lain seperti pajak Bea Hasil atas Tanah dan Bangunan (BHTB). Data APBD Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti halnya pada tahun 2013 PAD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 121.180.202.000,00, pada tahun 2014 naik menjadi Rp 143.021.955.000,00 dan pada tahun 2015 sebelum perubahan sebesar Rp 181.061.011.000,00.

Peningkatan PAD Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2014 tersebut belum menjamin bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ini sudah baik dari berbagai aspek, seperti tingkat efektifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang akan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 dapat diketahui sejauhmana perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar selama tiga periode ini dengan data sebagai berikut: Pada tahun 2013 merealisasikan pendapatan

sebesar Rp 5.476.240.923.032,00 sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 5.167.869.560.000,00 kejadian ini menghasilkan prestasi dengan nilai persentase sebesar 100,6% (sangat efektif). Pada tahun 2014 pendapatan berhasil direalisasikan sebesar Rp 1.520.017.711.832,00 dengan target sebesar Rp 1.507.471.416.000,00, dapat di ketahui bahwa pada tahun 2014 terjadi kenaikan prestasi sebesar 8,2% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 108.8% dengan kategori prestasi (sangat efektif). Akan tetapi pada tahun 2015 ini dengan adanya target penetapan sebesar Rp 1.736.760.182.000,00 hanya mampu merealisasikan sebesar Rp 1.417.516.899.221,00 dan hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan prestasi yang cukup drastis menjadi 81,62% dengan predikat kurang efektif (BPS Kabupaten Karanganyar, 2015)

Menanggapi situasi ini perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Salah satu tujuan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan atau penurunan. Akan tetapi secara umum adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah jika dilihat dari analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2013-2015 yang bertujuan untuk memperbaiki daripada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Evran Lexy Tambuwun, Sifrid S. Pangemanan dan Dhullo Afandi (2014) yang meneliti tentang analisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Manado. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan lima rasio yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi kinerja keuangannya dinilai masih kurang, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Manado terhadap pendapatan dari Pusat dan Provinsi masih tinggi, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Manado juga masih kurang diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, kemudian efektivitas realisasi penerimaan PAD Pemerintahan Kota manado dikatakan cukup efektif, begitu pula halnya dengan efisiensi belanja Pemerintah Kota Manado yang dapat dikategorikan baik yang diukur dengan Rasio Efisiensi Belanja.

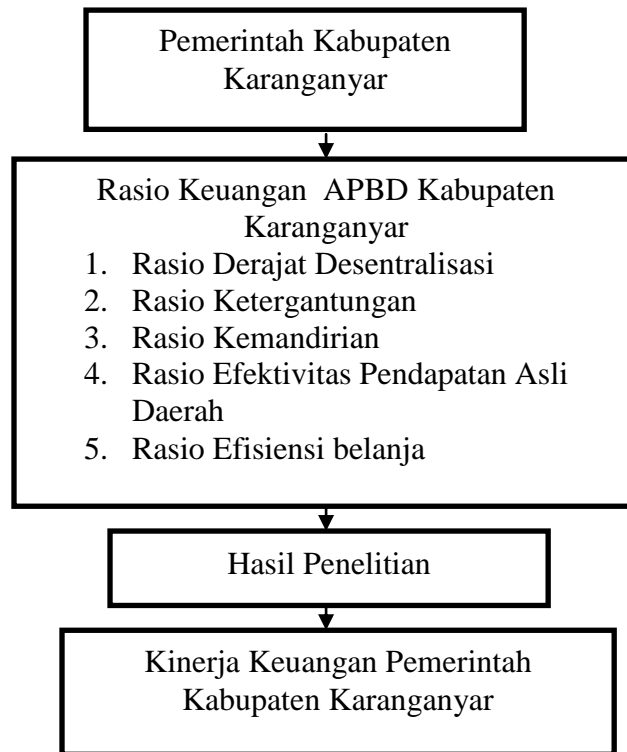
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Evran Lexy Tambuwun, Sifrid S. Pangemanan dan Dhullo Afandi (2014) yaitu terletak pada ruang lingkup penelitian dan periode penelitian, dalam penelitian terdahulu ruang lingkup penelitian dilaksanakan di Kota Manado dengan periode penelitian tahun 2011-2013, sedangkan dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar dengan periode penelitian tahun 2013-2015.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis optimalisasi kinerja keuangan di Pemerintahan Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan indikator rasio keuangan terhadap APBD Tahun Anggaran 2013-2015

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan miniatur keseluruhan dari proses penelitian. Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



### Definisi Operasional Variabel

1. Kinerja Keuangan Daerah adalah wujud dari bentuk penilaian terhadap pencapaian kegiatan atau serangkaian program suatu organisasi dalam satu periode tertentu di bidang keuangan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, yang nantinya akan dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran yang sebelumnya telah disepakati bersama.
2. Rasio Derajat Desentralisasi  
Rasio Derajat Desentralisasi adalah rasio yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, Haryadi (2002). Ini berarti bahwa pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban, pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota.
3. Rasio Tingkat Ketergantungan  
Rasio Tingkat Ketergantungan adalah tingkat untuk mengukur kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, Haryadi (2002). Apabila semakin tinggi presentasi rasio ketergantungan berarti semakin baik artinya tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat sangat mengecil.
4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Rasio Kemandirian adalah rasio yang berfungsi untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, Halim (2012). Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

## 5. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang berfungsi untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, Halim (2012). Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

## 6. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, Halim (2012). Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian di mana penulis hanya menggambarkan mengenai fakta-fakta, data-data, keadaan yang diketahui secara rinci dan seteliti mungkin. Adapun bentuk penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilakukan karena penulis bertujuan untuk mendapatkan data penelitian mengenai kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2013-2015.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi. Metode yang digunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 121.180.202.000 atau sebesar 9,81% dari total pendapatan. Mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp 143.021.955.000 atau sebesar 9,76% dari total pendapatan. Pada tahun 2015 PAD Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan menjadi Rp 181.061.011.000,00 atau sebesar 11,21% dari total pendapatan.

Total pendapatan Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan 2015 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2013 total pendapatan daerah sebesar Rp 1.235.261.885.000 mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp 1.466.049.795,00 atau 18,68%. Pada tahun 2014 total pendapatan daerah sebesar Rp 1.615.471.166.000 naik 10,19% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 9,81%, turun menjadi 9,76% pada tahun 2014. Tahun 2014 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 11,21%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun pada tahun 2013-2014 dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00%. Sedangkan pada tahun 2015 masuk kategori kurang karena masuk kategori interval 10,01-20,00.

Hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama tiga tahun pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih Sangat Kurang dan kurang, ini

berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang Sangat Kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Karanganyar masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Untuk karena itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Karanganyar diharapkan untuk berupaya meningkatkan PADnya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

Hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Kabupaten Karanganyar tingkat ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Karanganyar dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang.

### **Rasio Ketergantungan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 Transfer Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 886.358.718.000,00. Mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp 939.150.975.000,00. Pada tahun 2015 pendapatan transfer Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan menjadi Rp 983.448.424.000,00. Berdasarkan perhitungan pada tabel XIX menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tergolong sudah baik di mana peranan pemerintah daerah lebih dominan dari pada pemerintah pusat. Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio ketergantungan Keuangan Daerah selama tiga tahun pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki rata-rata ketergantungan yang rendah.

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 121.180.202.000,00 atau sebesar 13,67% dari total pendapatan transfer. Mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp 143.021.955,00 atau sebesar 15,23% dari total pendapatan transfer. Pada tahun 2015 PAD Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan menjadi Rp 181.061.011.000,00 atau sebesar 18,41% dari total pendapatan transfer.

Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sebesar Rp 886.358.718.000,00, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 939.150.975.000,00. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 983.4483.424,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama tiga tahun pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah

dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan Kabupaten Karanganyar dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

### **Rasio Efektivitas PAD**

Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa target PAD Kabupaten Karanganyar selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PAD dianggarkan sebesar Rp 122.100.000.000,00. Pada tahun 2014 anggaran PAD dinaikkan menjadi Rp 143.200.000.000,00. Pada tahun 2015 PAD dianggarkan sebesar Rp 180.000.000.000,00. Realisasi PAD Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 121.180.202.000,00. Mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp 143.021.955,00. Pada tahun 2015 PAD Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan menjadi Rp 181.061.011.000,00.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 sebesar 99,25%, tahun 2014 sebesar 99,88% dan tahun 2015 sebesar 100,59%, Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2013 dan 2014 berjalan Cukup Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100%. Untuk tahun 2015 sudah Sangat Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Hasil analisis Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Karanganyar sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100% yaitu 99,91%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) yang melakukan penelitian di Kabupaten Blitar dijelaskan bahwa kinerja keuangan Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif. Begitupun juga dalam penelitian ini di mana kinerja keuangan Kabupaten

Karanganyar sudah efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

### **Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Berdasarkan perhitungan diketahui realisasi total biaya pemungutan pendapatan asli Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan 2015 rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 biaya pemungutan PAD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 3.479.805.000,00, naik menjadi Rp 4.437.172.300,00 pada tahun 2014. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 menjadi Rp 4.465.469.950,00.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Kabupaten Karanganyar tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 3,81% atau dapat dikatakan Sangat Efisien. Pada tahun 2013 rasio efisiensinya sebesar 2,87%, kemudian tahun 2014 menjadi 3,10% dan tahun 2015 sebesar 2,47%. Rata-rata Efisiensi Keuangan Kabupaten Karanganyar yang tergolong masih Sangat Efisien karena rata-rata rasionya 3,81% diakibatkan karena total biaya pemungutan PAD masih lebih kecil daripada pendapatan daerahnya.

### **KESIMPULAN**

Hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2015 menunjukkan pada tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 9,81%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 9,76%, tahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 11,21% masuk kategori kurang. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2014, namun jika dirata-rata selama tahun 2013-2015 dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih kurang, karena masih berada dalam skala interval 10,01-20,00%. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2014) yang menyatakan bahwa rasio desentralisasi Pemerintah Kota Manado mengalami pertumbuhan yang baik.

Hasil analisis rasio ketergantungan Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2015 menunjukkan ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tergolong rendah. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 71,75% dan tahun 2014 yaitu sebesar 64,06% masuk kategori rendah. Sedangkan tahun 2015 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 60,88% masuk kategori rendah sekali, artinya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam membiayai pengeluaran daerah tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer rendah, artinya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2014) yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan Pemerintah Kota Manado masih kurang.

Hasil analisis rasio kemandirian keuangan Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2015 menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2013 di mana nilainya sebesar 13,67% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 18,41%. Sedangkan tahun 2014 sebesar 15,23%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Evran Lexy Tambuwun, Sifrid S. Pangemanan dan Dhullo Afandi (2014) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Manado masih sangat rendah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan Nadia (2014) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Manado masih kurang.



Hasil analisis rasio efektivitas PAD Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 dan 2014 cukup efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 99,25% dan 99,88%. Untuk tahun 2015 sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 100,59%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Evran Lexy Tambuwun, Sifrid S. Pangemanan dan Dhullo Afandi (2014) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas pada Pemerintah Kota Manado masuk kategori baik. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Oesi (2013) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas Kota Malang tahun anggaran 2007-2011 masuk kategori baik.

Hasil analisis rasio efisiensi belanja daerah Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2015 tergolong sangat efisien karena interval efisiensinya kurang dari 10%. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatan asli daerah lebih besar daripada realisasi biaya pemungutan pendapatan asli daerah. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Evran Lexy Tambuwun, Sifrid S. Pangemanan dan Dhullo Afandi (2014) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi pada Pemerintah Kota Manado masuk kategori baik. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Oesi (2013) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi Kota Malang tahun anggaran 2007-2011 masuk kategori baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Evran Lexy dkk, 2014, “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado*”, Jurnal EMBA, Volume 2, No. 4, Desember, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Menteri Dalam Negeri, 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*.
- Nadya Pretti Kalalo, 2014, “*Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado*”, Jurnal EMBA, Volume 2, No.1, Maret Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Oesi Agustina, A, 2013, “*Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah*”, Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011), Prisma, No.2
- [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id)
- [www.karanganyarkab.bps.go.id](http://www.karanganyarkab.bps.go.id)
- [www.dppkad.karanganyarkab.go.id](http://www.dppkad.karanganyarkab.go.id)